



*Direktorat Pengaduan, Pengawasan  
dan Sanksi Administrasi*

# RENCANA KERJA 2019

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**FIGHT AGAINST  
X-CRIME**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN  
SANKSI ADMINISTRASI**

---

---

**PERATURAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Nomor : ..... 2018

**TENTANG**

**RENCANA KERJA  
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2019**

**DIREKTUR**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi tahun 2015-2019 pada Desember 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Direktur perlu menetapkan Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019 dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

/5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9).
9. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.4/PHLHK/SET/SET.1/9/2018 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2019**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019 menjadi strategi dan kebijakan dalam mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019.

Pasal 3

Peraturan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : ..... Desember 2018

**DIREKTUR,**

**Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si**  
**NIP 19630705 198303 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia Nya, telah disusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019.

Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja yang disusun sebagai instrumen pengendali kinerja dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi untuk mencapai target kinerja pada tahun 2019.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Direktur,

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si  
NIP 19630705 198303 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi dan SDM .....	3
<b>BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018</b> .....	4
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018 .....	4
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018 .....	6
<b>BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2018</b> .....	8
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2019 .....	8
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2019 .....	10
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	12

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2017 .....	5
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 .....	5
Tabel 3. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 .....	6
Tabel 4. Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja .....	7
Tabel 5. Rencana dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan September dan Prognosis Bulan Desember Tahun 2018 .....	7
Tabel 6. Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang Masuk Ke Dalam Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air .....	8
Tabel 7. Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi .....	10
Tabel 8. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi .....	10
Tabel 9. Proyek Prioritas Nasional .....	11

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi .....	3

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Target dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Penegakan Hukum LHK Tahun 2019
- Lampiran 2. Distribusi Target Per Output Per Satuan Kerja Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
- Lampiran 3 Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Output Per Satuan Kerja Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
- Lampiran 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2015-2019
- Lampiran 5. Matrik Rencana Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi diwajibkan untuk membuat dokumen perjanjian kinerja. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen rencana kerja tahunan. Dokumen rencana kerja tahunan disusun untuk menentukan tujuan, sasaran dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan digunakan juga dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan.

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran juga diupayakan sebagaimana amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan nasional, serta pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Prioritas Nasional ditetapkan mulai pada tahun 2017 dan terdapat 23 Prioritas Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendukung 14 Prioritas Nasional dari 23 Prioritas nasional, 21 Proyek Prioritas Nasional dan 47 Kegiatan prioritas Nasional. Sedangkan pada tahun 2018 dilakukan penajaman atau *refocusing* dalam Prioritas Nasional dari 23 menjadi 10 Prioritas Nasional, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 dari 10 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas, 23 Kegiatan Prioritas. Penajaman dan *refocusing* kembali dilakukan tahun 2019, dari 10 Prioritas Nasional menjadi 5 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas dan 23 Kegiatan Prioritas. *Refocusing* terhadap Prioritas Nasional ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program, dan tercapainya target yang sudah ditetapkan. Pencapaian target juga diharapkan didukung pendanaan dari berbagai sumber dengan integrasi sumber pendanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2019 meliputi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Anggaran Responsif Gender, Anggaran Pendidikan dan Anggaran Infrastruktur. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini didorong untuk mencapai sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dimana Gini Ratio adalah 0,36, tingkat kemiskinan menurun menjadi 7-8%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5-5,5%, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,98 dan bertujuan untuk mendukung “Pemerataan Pembangunan untuk untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Arah Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar dalam mendukung pembangunan nasional:

1. Mendorong peningkatan usaha ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui perhutanan sosial, peningkatan investasi masyarakat termasuk pariwisata dan TORA
2. Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis DAS melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan penegakan hukum
3. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, restorasi gambut, dan perbaikan tata kelola kawasan untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

Pembangunan 5 tahunan yang pada tahun 2019 memasuki tahun terakhir menjadi penentu keberhasilan pencapaian target dengan arahan prioritas nasional yang sudah ditetapkan. Untuk itu peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung 3 dari 5 prioritas nasional menjadi sangat penting. Dari 13 program yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pada tingkat nasional, dimana 15 DAS, 429 KPH dan 54 taman nasional ditargetkan sudah menunjukkan pencapaian. Akses masyarakat dalam pengelolaan hutan juga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat.

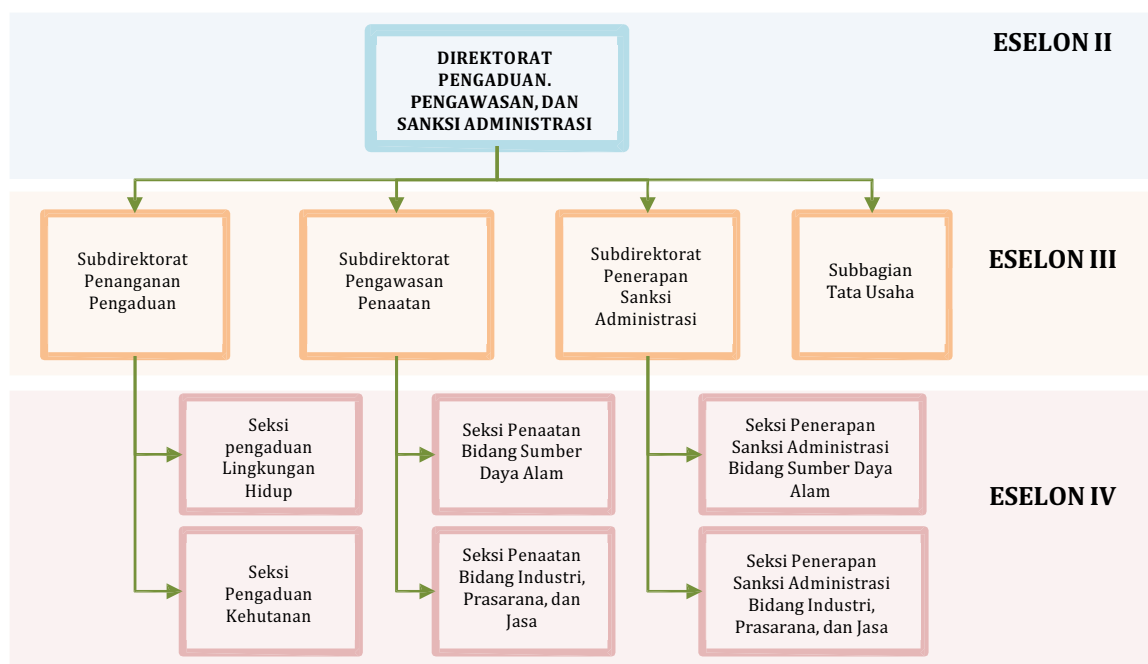
## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK- II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi adalah melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi mempunyai fungsi, sebagai berikut.

1. Penyiapan perumusan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan pengenaan dan evaluasi pengenaan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Struktur organisasi Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi disajikan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

## BAB II

### CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tingkat capaian kinerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam Tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2017

Sasaran Kegiatan			
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	125 Pengaduan	133 Pengaduan	106,4
Pengawasan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100 Izin	219 Izin	219
Pengenaan sanksi administrasi	70 Sanksi	126 Sanksi	180
Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	43 PPLH	43 PPLH	100
Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum	14 PPLH	14 PPLH	100

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi selalu sesuai atau melebihi target. Total capaian kinerja untuk 5 IKK pada Direktorat PPSA adalah sebesar 141,08%, hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja Direktorat PPSA tahun 2017 adalah sangat baik.

## 2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2018

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang tercantum pada Rencana Kerja ini merupakan hasil kinerja kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sampai dengan Bulan September Tahun 2018. Tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2. Berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 (s.d. September 2018)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Capaian Kinerja (%)	Progres	Prognosis Desember 2018	
				Realisasi	%
Pengaduan yang masuk tertangani	350	43,07	151	350	100
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	180	73,20	132	180	100
Penerapan sanksi administrasi	140	43,73	61	140	100
Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	260	32,44	84	260	100

Berdasarkan Tabel 2. tersebut, diketahui bahwa jumlah IKK keseluruhan pada Direktorat PPSA tahun 2018 hanya sebanyak 4 IKK. Sampai dengan bulan September 2018, capaian kinerja untuk seluruh IKK tersebut baru mencapai 48,11%.

## B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

### 1. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-029.10.1.400425/2017 tanggal 5 Desember 2016, pada tahun 2017 Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mendapatkan anggaran sebesar Rp10.946.970.000,00 dengan Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.

Rencana penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2017 sesuai dengan Halaman III DIPA BA 029 Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebesar Rp10.946.970.000,00 atau 100%. Realisasi bruto pada tahun 2017 sebesar Rp10.684.654.074,00 atau 97,60% dari total anggaran, sedangkan realisasi netto tahun 2017 sebesar Rp10.678.545.991,00 atau 97,55%.

Rincian realisasi anggaran tahun 2017 secara rinci tersaji pada Tabel 3. di bawah ini.

Tabel 3. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

KEGIATAN POKOK	PAGU	RENCANA		REALISASI	
		Rp	%	Rp	%
<b>Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi</b>	<b>10.946.970.000</b>	<b>10.946.970.000</b>	100	<b>10.684.654.074</b>	<b>97,60</b>
Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	3.123.817.000	3.123.817.000	100	3.078.763.402	98,56
Penanggungjawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	2.292.010.000	2.292.010.000	100	2.253.295.560	98,31
Sanksi Administrasi yang ditaat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan meningkat setiap tahun	2.786.020.000	2.786.020.000	100	2.691.260.974	96,60
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	684.250.000	684.250.000	100	676.372.263	98,85
Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	132.000.000	132.000.000	100	129.022.225	97,74
Layanan Perkantoran	946.970.000	946.970.000	100	919.910.718	97,14

Realisasi anggaran tahun 2017 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 4. berikut ini.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Barang	10.270.817.000	10.012.218.542	97,48
a. Operasional	755.020.000	728.739.168	96,52
b. Non Operasional	9.515.797.000	9.283.479.374	92,56
Belanja Modal	676.153.000	672.435.532	99,45
Jumlah	<b>10.946.970.000</b>	<b>10.684.654.074</b>	<b>97,60</b>

## 2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2018

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA – 029.10.1.400425/2018 tanggal 5 Desember 2017, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp19.841.494.000,00.

Rencana penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan September tahun 2018 sesuai dengan Halaman III DIPA Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi tahun 2017 sebesar Rp11.312.558.000,00 atau 57,01%, sedangkan realisasinya mencapai Rp9.648.857.693,00 atau 48,63% dari total anggaran. Target dan realisasi anggaran sampai dengan bulan September tahun 2018 dan Prognosis bulan Desember 2018 secara rinci tersaji pada Tabel 5. di bawah ini.

Tabel 5. Rencana dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan September dan Prognosis Bulan Desember Tahun 2018

Output	Pagu (Rp)	Realisasi s.d. September 2018		Prognosis Realisasi Desember 2018	
		Rp	%	Rp	%
Pengaduan yang masuk tertangani	4.644.524.000	2.000.179.728	43,07	4.644.524.000	100
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	4.350.000.000	3.184.354.063	73,20	4.350.000.000	100
Penerapan Sanksi Administrasi	6.000.000.000	2.623.882.748	43,73	6.000.000.000	100
Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	3.900.000.000	1.265.017.356	32,44	3.900.000.000	100
Layanan Perkantoran	946.970.000	575.423.796,00	60,76	946.970.000	100

## BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2019

### A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KLHK DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

Pada Tahun 2019 Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi masuk dalam Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang Masuk Ke Dalam Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Program Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	Target		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2018	2019		
Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Penanganan Pencemaran DAS Citarum	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	-	50 Perusahaan	PHLHK	Pusat
		Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	260 Orang	1 lokasi	PHLHK	Pusat
	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengaduan yang Masuk Tertangani	35% (dari 1.000 Pengaduan)	375 Pengaduan	PHLHK	Pusat



Program Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	Target		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2018	2019		
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	30% Dari 600 izin	265 Izin	PHLHK	Pusat
		Sanksi Administrasi	70% dari 200 Sanksi Administrasi	100 Sanksi	PHLHK	Pusat

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebagai penanggung jawab Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan strategi optimalisasi upaya penanganan pengaduan, pengawasan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU dan ketaatan terhadap sanksi administrasi dalam rangka mendukung program KLHK Tahun 2019.

## B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2019

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebagai penanggung jawab Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi difungsikan untuk mengawal dan melaksanakan pencapaian Indikator Kinerja Program Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan dengan menetapkan **Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi**. Dalam rangka mendukung kegiatan yang hendak dicapai, ditetapkan Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 7. berikut.

Tabel 7. Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan TA 2019
Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani sebanyak 375 pengaduan
	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan terhadap perizinan LHK dan PUU yang berlaku sebanyak 265 izin
	Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan sebanyak 100 sanksi
	Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi di DAS Citarum sebanyak 50 perusahaan
	Penyediaan sarana prasarana pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang memenuhi standar minimum pada 1 lokasi

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, Sasaran Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan yang sudah disetujui dalam proses trilateral meeting (KLHK-BAPPENAS-Kemenkeu) dan sesuai dengan hasil RKP memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran kegiatan seperti disajikan pada Tabel 8. dan Tabel 9. berikut.

Tabel 8. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Kegiatan K/L	Sasaran Kegiatan	Output	Target
Penanganan Pengaduan, Pengawasan Izin dan Sanksi Administrasi	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	375 Pengaduan
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	265 Izin
		Penerapan Sanksi Administrasi	100 Sanksi
		Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi di DAS	50 perusahaan

Kegiatan K/L	Sasaran Kegiatan	Output	Target
		Citarum	
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	1 lokasi

Tabel 9. Proyek Prioritas Nasional

Proyek PN	Sasaran Kegiatan	Output	Target
Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	375 Pengaduan
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan terhadap perizinan LHK dan PPU yang berlaku	265 Izin
		Sanksi administrasi	100 Sanksi
Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi di DAS Citarum	50 perusahaan
		Penyediaan sarana prasarana pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang memenuhi standar minimum	1 lokasi

Anggaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019 adalah senilai Rp64.768.840.000,00 (alokatif) sedangkan anggaran untuk Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019 adalah senilai Rp35.028.400.000,00 (alokatif).

## BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019, maka seluruh kegiatan pada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk laporan hasil audit kinerja dari Inspektorat Jenderal serta Laporan Kinerja (LKj).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2015 - 2019 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Oleh karena itu Renja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis.

## LAMPIRAN

**Lampiran 1. Target dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Penegakan Hukum LHK Tahun 2019**

No	Program/Kegiatan/	Target	Satuan
	<b>Program : Penegakan Hukum LHK</b>		
	<b>Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi</b>		
1.	Pengaduan yang masuk tertangani	1.250	Pengaduan
2.	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	650	Izin
3.	Penerapan Sanksi Administrasi	100	Sanksi

**Lampiran 2. Distribusi Target Per Output Per Satuan Kerja Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019**

No	Output	Satuan	Pusat	Sumatera	Jabalnusra	Kalimantan	Sulawesi	Mal-Pap
1.	Pengaduan yang masuk tertangani	Pengaduan	375	250	225	150	110	90
2.	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	Izin	265	125	100	75	60	25
3.	Penerapan Sanksi Administrasi	Sanksi	100	-	-	-	-	-
4.	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	Perusahaan	50	-	50	-	-	-

**Lampiran 3. Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Output Per Satuan Kerja Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019**

No	Pagu Anggaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Satuan	Output Kegiatan		Output Direktorat	
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Poin / Layanan	78	159.901.932.000	1	2.228.400.000
2.	Pengaduan yang masuk tertangani	Pengaduan	1200	19.556.520.000	375	6.300.000.000
3.	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	Izin	650	18.712.320.000	265	6.000.000.000
4.	Penerapan Sanksi Administrasi	Sanksi	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000
5.	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	Perusahaan	100	3.000.000.000	50	2.000.000.000
6.	Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Lokasi	6	18.000.000.000	1	13.000.000.000
	Jumlah			224.670.772.000		35.028.400.000

#### Lampiran 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	Satuan	Target/ Capaian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan	Target	500	500	500	1.000	1.250
			Capaian	562	684	529	900*	1.200*
2.	Pengawasan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	Izin	Target	500	300	500	600	650
			Capaian	238	597	1.094	575*	600*
3.	Penaatan Sanksi Administrasi	Sanksi	Target	45	70	70	140	100
			Capaian	48	220	126	130*	95*

Ket. \*) Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan

#### Lampiran 5. Matrik Rencana Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2019

No	Program/Kegiatan/Output/Suboutput/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Sat.	Alokasi (ribu rupiah)	Lokasi	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<b>Penegakan Hukum LHK</b>									
	<b>Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi</b>									
1.	Pengaduan yang masuk tertangani	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	375	Pengaduan	6.300.000	DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
	a. Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup				3.732.610					
	b. Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla				2.567.390					
2.	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	Meningkatnya ketaatan	265	Izin	6.000.000	DKI Jakarta, Jawa	Penguatan Sistem	Penguatan Kelembagaan,	Peningkatan Daya	Pemantapan Ketahanan

No	Program/Kegiatan/Output/Suboutput/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Sat.	Alokasi (ribu rupiah)	Lokasi	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	a. Pengawasan perizinan lingkungan hidup sektor Industri, Prasarana dan Jasa	pelaku usaha terhadap ketentuan kewajiban dalam perizinan lingkungan hidup dan kehutanan			2.500.000	Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara	Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
	b. Pengawasan perizinan lingkungan hidup sektor Sumber Daya Alam				3.000.000					
	c. Pengawasan perizinan lapis kedua				500.000					
3.	Penerapan Sanksi Administrasi	Meningkatnya sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	100	Sanksi	5.500.000	DKI Jakarta	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
	a. Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Sumber Daya Alam				2.673.340					
	b. Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Industri Prasarana dan Jasa				2.406.930					
	c. Penegakan Hukum Administrasi Lapis Kedua				199.980					
	d. Penegakan Hukum Administrasi Kebakaran Hutan dan Lahan				219.750					
4.	Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi pada DAS Citarum	50	Perusahaan	2.000.000	DKI Jakarta	Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum	Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
	Penanganan Pengaduan di DAS Citarum				500.000					
	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup di DAS Citarum				1.000.000					
	Pengenaan Sanksi Administrasi Lapis Kedua di DAS Citarum				500.000					
5.	Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Tersedianya sarana dan prasarana	1	Lokasi	13.000.000	DKI Jakarta	Non Prioritas Nasional	Non Prioritas Nasional	Non Prioritas Nasional	Non Prioritas Nasional
	Penyediaan Sarana Pengaduan, Pengawasan dan				12.200.000					



No	Program/Kegiatan/Output/Suboutput/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Sat.	Alokasi (ribu rupiah)	Lokasi	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Sanksi Administrasi	PPLH dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani pengaduan, melaksanakan pengawasan dan penerapan sanksi administrasi								
	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi PPLH				800.000					
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Tersedianya layanan dukungan manajemen untuk pelaksanaan tugas satker	1	Layanan	2.228.400	DKI Jakarta	Non Prioritas Nasional	Non Prioritas Nasional	Non Prioritas Nasional	Non Prioritas Nasional
	Layanan Dukungan Manajemen Satker		1	Layanan	375.000					
	Layanan Perkantoran		1	Layanan	1.853.400					